# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu bagian permasalahan yang besar bagi kota – kota besar di Indonesia. Kenyataannya kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang menjadi pusat perhatian dan dihadapi negara-negara berkembang, termasuk salah satunya Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu gambaran kehidupan masyarakat negara-negara berkembang yang diperkirakan mencapai kurang lebih satu milyar penduduk dunia mengalami kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara berkembang. Di Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh pemerintah negara. Meski telah banyak program penanganan kemiskinan direncanakan dan dilaksanakan namun dapat dilihat realitanya upaya penanganan kemiskinan masih belum sesuai dengan harapan masyarakatnya.

Pemerintah negara dalam melaksanakan program penanganan kemiskinan ini cenderung hanya melihat dari aspek rendahnya pendapatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Bahkan banyak program yang dilaksanakan untuk menangani kemiskinan yang hanya melihat dari sisi luar tanpa melihat permasalahan dasar penyebab kemiskinan. Tak hanya itu program penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah cenderung mengikuti wilayah-wilayah lain sehingga dibeberapa wilayah program kemiskinan menjadi tidak bermanfaat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kemiskinan diperkotaan merupakan permasalahan yang sangat penting karena berkembangnya suatu wilayah dapat diukur dari tingkat kemiskinan masyarakat di suatu wilayah tersebut. Kemiskinan ini terkait kebutuhan-kebutuhan dasar ekonomi masyarakat disuatu wilayah seperti kebutuhan lapangan pekerjaan, kebutuhan fasilitas tempat tinggal yang berupa perumahan, kebutuhan, kebutuhan fasilitas umum sebagai penunjang kehidupan masyarakat, dan kebutuhan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Secara harfiah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemiskinan berasal dari kata “miskin” memiliki arti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok yang primer seperti papan, sandang, papan, kesehatan (air bersih, sanitasi), kerja yang wajar dan pendidikan dasar tak terpenuhi; apalagi kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti misalnya partisipasi, rekreasi, atau lingkungan hidup yang menyenangkan.

Negara Indonesia sendiri memiliki wewenang khusus untuk menangani persoalan terkait fakir miskin. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Berdasarkan Kebijakan peraturan Kementrian Sosial Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Penanggulangan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam hal ini pelaksanaan penanganan fakir miskin dapat dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing agar program penanggulangan fakir miskin sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan kementrian sosial Nomer 8 Tahun 2012 terkait tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) salah satunya yaitu Fakir Miskin.

Kota Bandung adalah salah satu kota yang masih tinggi tingkat pertumbuhan dibidang ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat. Kota Bandung telah menjadi wilayah destinasi wisata di Jawa Barat, tentunya berpotensi mengalami inflasi perekonomian di Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di Indonesia.

Tingginya jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin menjadi pusat perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jika inflasi ekonomi naik secara drastis maka secara perlahan akan mendorong masyarakat berkategori tidak miskin menjadi termasuk kategori miskin. Oleh karena itu kemiskinan di wilayah Kota Bandung menjadi permasalahan yang sangat serius dan harus cepat di tanggulangi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Dalam menanggulangi kemiskinan dengan adanya kebijakan tentang Penanggulangan Kemiskinan harus dengan cara yang berkelanjutan. Adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang PenanggulanganKemiskinan yang berasaskan: a. kemanusiaan, b. keadilan sosial, c. nondiskriminasi, d. kesejahteraan, e. kesetiakawanan, dan f. pemberdayaan. Dalam pelaksanaan nya dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya mengurangi adanya fakir miskin agar jumlah kemiskinan dapat berkurang.

Terdapat ruang lingkup dalam kebijakan tentang Penanggulangan kemiskinan ini yaitu: a. sasaran dan pendataan penduduk miskin dan orang tidak mampu, b. hak dan tanggung jawab penduduk miskin dan orang tidak mampu, c. strategi penanggulangan kemiskinan daerah kota, d. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, f. koordinasi penanggulangan kemiskinan, g. pembinaan dan pengawasan, dan i. pembiayaan. Beberapa point tersebut yang menjadi implementator dalam kebijakan ini yaitu Dinas Sosial Kota Bandung.

Program-Program penanggulangan kemiskinan yaitu a. Kegiatan peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, b. Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, c. Kegiatan pelatihan keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, d. Kegiatan Pendampingan terhadap program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi. Maka dengan adanya penanggulangan ini harus dapat mengoordinasikan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait dan berwenang dalam penanggulangannya.

Implementasi merupakan salah satu proses untuk melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah disahkan. Implementasi menjadi seperangkat kegiatan untuk melaksanakan kebijakan bagi publik agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, beberapa undang-undang, seperti peraturan daerah dibuat untuk mendekatkan kebijakan secara langsung ke publik. Peraturan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat.

Implementasi peraturan daerah merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan dengan baik setelah proses persetujuan kebijakan. Dalam proses implementasi ini perlu melibatkan pihak yang berwenang, baik pemerintah maupun masyarakat. Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Pelaksanaan perda ini tentunya dapat dilakukan melalui program-program dari instansi terkait sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin.

Mengacu data yang tercantum pada Badan Pusat Statistik (Kota Bandung), tingkat kemiskinan di Kota Bandung memiliki potensi kenaikan jika terjadinya inflasi ekonomi pasca pemulihan ekonomi dimasa pasca wabah Pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2021 angka Masyarakat Miskinan di Kota Bandung mencapai 112,50 ribu orang. Terdapat data Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, P1, P2 di Kota Bandung pada tahun 2012-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

**Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, P1 dan P2 di Kota Bandung Tahun 2012-2021.**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

Dapat dilihat dari table diatas menunjukan bahwa penurunan angka kemiskinan pada tahun 2018-2020 sekitar 0,19 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai 0,99 persen. Hal ini dibuktikan dengan angka kenaikan kemiskinan pada tahun 2021 karena tidak lain karena dipengaruhi adanya Pandemi *Covid-19*. Pemerintah Kota Bandung melalui perantara Dinas Sosial Kota Bandung yang berwenang melaksanakan penanganan kemiskinan ini. Tercantum pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tugas pokok membantu Wali Kota terkait pelaksanaan urusan Pemerintah di Bidang Sosial. Dalam susuan organisasi Dinas Sosial Kota Bandung terdapat Bidang-Bidang yang terkait dan berwenang yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Data dan Informasi sebagai pendukung maupun pelaksana dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.

Terdapat masalah yang terjadi dan diamati oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari permasalahan berikut:

1. Komunikasi Antar Organisasi

Penanggulangan Kemiskinan ini diperlukannya komunikasi antar organisasi yang baik dan intens. Masyarakat Fakir Miskin perlu berkomunikasi dengan pihak daerah tempat tinggal yaitu kecamatan yang kemudian mengkoordinasikan terkait masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat kepada pelaksana kebijakan. Tingginya kemiskinan di Kecamatan Kiaracondong dan Bojongloa Kaler membuktikan bahwa kurangnya komunikasi antar organisasi antar pihak kecamatan dengan pihak pelaksana kebijakan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kode Kecamatan | Kecamatan | KK | Individu |
| 1 | 32.73.16 | Kiaracondong | 20.887 | 55.781 |
| 2 | 32.73.04 | Bojongloa Kaler | 29.900 | 71.538 |

Sumber: Dinas Sosial (Data sebaran kemiskinan di kota bandung 2022).

1. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Kondisi Ekonomi, Tahun 2021 merupakan memasuki pasca pandemic *Covid-19*, Kota Bandung mengalami kenaikan kemiskinan sekitar 0.99 persen, hal ini menjadi angka yang cukup tinggi bagi suatu kota dalam jangka waktu satu tahun. Hal ini dipastikan terdapat permasalahan ekonomi dimasyarakat, oleh karena itu perlu adanya tindakan implementasi kebijakan dan diimplementasikan melalui program yang akurat untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kondisi Sosial, Pelaksanaan Program pada suatu wilayah tentunya mempunyai kebutuhan masing-masing yang berbeda. Adanya kecemburuan sosial dari masyarakat penerima manfaat program dan yang tidak menerima manfaat program. Kecenderungan menyamaratakan program disetiap wilayah cenderung membuat program tidak efektif karena ada kemungkinan terjadinya pemberian kebutuhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Salah satu yang memperkuat adanya permasalahan ini yaitu masih tingginya angka kemiskinan yang salah satunya di kecamatan Bojongloa kaler mencapai 71.538 individu masyarakat pada tahun 2022.

Kondisi Politik, masih adanya kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi permasalahan kemiskinan ini dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskianan sebagai kebutuhan politiknya. Salah satu yang memperkuat adanya permasalahan ini yaitu pada kasus mentri sosial Juliari P Batubara terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32.482 miliar. Juliari dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021.

Penangggulangan Kemiskinan ini harus terkoordinasi antara kebijakan dan program yang dilaksanakan di daerah agar sesuai dengan tujuan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tertentu dan diperhatikan agar bantuan tersebut berdampak positif bagi masyarakat. Tentunya Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dan harus memiliki perencanaan yang matang untuk menangani Permasalahan Kemiskianan ini khususnya ada Fakir miskin di Kota Bandung. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji dengan baik dan menyesuaikan dengan rencana program pelaksanaannya agar sesuai dengan permintaan masyarakat.

Penanggulangan fakir miskin membutuhkan kerja sama dengan otoritas di daerahnya masing-masing. Penguatan sumber daya masyarakat yang ada juga merupakan bentuk kerjasama yang baik dan dapat mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan fakir miskin khususnya di Kota Bandung.

Berdasarkan Uraian masalah diatas peneliti akan melaksanakan penelitian dengan mengambil judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung”.**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Focus penelitian pada penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung merupakan salah satu hal yang penting dilakukan dengan baik agar memberikan dampak positif kepada masyarakat Kota Bandung. Penelitian ini mengacu pada Dimensi menurut Van Metter dan Van Horn yang dimana terdapat Standar dan Tujuan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi Implementator, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, terdapat tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Semua penelitian pastinya mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara akademis, dari penelitian ini terdapat manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam penerapan teori penelitian selama peneliti dan dapat bermanfaat khususnya bagi Kajian Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

1. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat sebagai bahan sumbang pemikiran yang menjadi masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait implemantasi kebijakan penanggulangan kemiskianan di Kota Bandung.